

1. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan ... dan diresmikan oleh

- a. Menteri Keuangan, Presiden
- b. DPD, Presiden
- c. DPD, MPR
- d. DPD, DPR
- e. MPR, Presiden

Pembahasan

Jawaban : b

Pasal 23F ayat (1) UUD 1945 : Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada ...

- a. Presiden dan Menteri Keuangan
- b. Menteri Keuangan
- c. MPR dan DPR
- d. DPR, DPD, dan DPRD
- e. Menteri Keuangan, DPR, DPD, dan DPRD

Pembahasan

Jawaban : d

Pasal 23E ayat (2) UUD 1945 : Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

3. Dibawah ini yang tidak dipilih dipilih langsung oleh rakyat adalah ...

- a. DPR
- b. BPK
- c. DPD
- d. DPRD
- e. Presiden

Pembahasan

Jawaban : b

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

4. Yang berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang adalah ...

- a. Mahkamah Agung
- b. Mahkamah Konstitusi
- c. Komisi Yudisial
- d. Badan Pemeriksa Keuangan
- e. Presiden

Pembahasan

Jawaban : a

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.*

5. Calon Hakim Agung diusulkan oleh ... kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

- a. DPRD
- b. Komisi Yudisial
- c. BPK
- d. MK
- e. MA

Pembahasan

Jawaban : b

Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 : Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

6. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim merupakan wewenang dari ...

- a. DPR
- b. MPR
- c. Komisi Yudisial
- d. Presiden
- e. Mahkamah Konstitusi

Pembahasan

Jawaban : c

Pasal 24B ayat (1) : Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

7. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh ...

- a. Presiden
- b. MPR
- c. DPR
- d. MA
- e. MK

Pembahasan

Jawaban : a

Pasal 24B ayat (3) : Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

8. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum merupakan tugas dari ...

- a. Mahkamah Agung
- b. Mahkamah Konstitusi
- c. Komisi Yudisial
- d. DPR
- e. Pengadilan Negeri

Pembahasan

Jawaban : b

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

9. Mahkamah Konstitusi mempunyai ... orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden.

- a. 5
- b. 9
- c. 12
- d. 15
- e. 32

Pembahasan

Jawaban : b

Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 : Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

10. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hal ini tercantum didalam UUD 1945 pada pasal 28E ayat ...

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 4
- e. 5

Pembahasan

Jawaban : c

Pasal 28E :

- 6. Ayat 1 : Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,

memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

7. Ayat 2 : Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
8. Ayat 3 : Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.